



WALIKOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 510 TAHUN 2018**

TENTANG

**PROSEDUR TETAP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Prosedur Tetap Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

44

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-2889 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11);

15. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 297 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 297);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PROSEDUR TETAP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pekanbaru
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Prosedur Tetap Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD.

Pasal 2

Prosedur tetap Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui Peraturan Walikota Pekanbaru ini diundangkan dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 JUNI 2018

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 JUNI 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR .80

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SYAMSUWIR

NIP.19681028 199503 1 001

KODE DAN KLASIFIKASI
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PEKANBARU
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KETERANGAN
1	2	3
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1.01.	PENDIDIKAN	
1.02.	KESEHATAN	- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	- Berdasarkan Pemendagri No.13 Tahun 2006
1.05.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	- Berdasarkan Permendagri No.59 Tahun 2007
1.06.	SOSIAL	- Berdasarkan Permendagri No.21 Tahun 2011
2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
2.01.	TENAGA KERJA	
2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.03.	PANGAN	
2.04.	PERTANAHAN	
2.05.	LINGKUNGAN HIDUP	
2.06.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.09.	PERHUBUNGAN	
2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.11.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
2.12.	PENANAMAN MODAL	
2.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2.14.	STATISTIK	
2.15.	PERSANDIAN	
2.16.	KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2.17.	PERPUSTAKAAN	
2.18.	KEARSIPAN	
3.	URUSAN PILIHAN	
3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.02.	PARIWISATA	
3.03.	PERTANIAN	
3.04.	KEHUTANAN	
3.05.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3.06.	PERDAGANGAN	
3.07.	INDUSTRI	
3.08.	KETRANSMIGRASIAN	
4.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
4.01.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
4.02.	KEUANGAN	
4.03.	KEPEGAWAIAN	
4.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
4.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
5.01.	KEPALA DAERAH DAN SEKRETARIAT DAERAH	
5.02.	DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD	
6.	URUSAN KEWILAYAHAN	
6.01.	KECAMATAN	
7.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
7.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.	PENGAWASAN	
8.01.	PENGAWASAN.	

WALIKOTA PEKANBARU

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 7 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR...80

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-Undangan,

SYAMSUWIR

NIP. 196810281995031001

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KETERANGAN
1	2	3
3.04.	KEHUTANAN	
3.05.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3.06.	PERDAGANGAN	
3.06.01.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3.06.02.	DINAS PASAR	
3.07.	INDUSTRI	
3.08.	KETRANSMIGRASIAN	
4.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
4.01.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
4.01.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
4.02.	KEUANGAN	
4.02.00.	PPKD	
4.02.01.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
4.02.02.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
4.03.	KEPEGAWAIAN	
4.03.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
4.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
4.04.01.	KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
4.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
4.05.01.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
5.01.	KEPALA DAERAH DAN SEKRETARIAT DAERAH	
5.01.01.	KDH & WKDH	
5.01.02.	SEKRETARIAT DAERAH	
5.02.	DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD	
5.02.01.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
5.02.02.	SEKRETARIAT DPRD	
6.	URUSAN KEWILAYAHAN	
6.01.	KECAMATAN	
6.01.01.	KECAMATAN BUKIT RAYA	
6.01.02.	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI	
6.01.03.	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI	
6.01.04.	KECAMATAN RUMBAI	
6.01.05.	KECAMATAN RUMBAI PESISIR	
6.01.06.	KECAMATAN TAMPAN	
6.01.07.	KECAMATAN TENAYAN RAYA	
6.01.08.	KECAMATAN LIMAPULUH	
6.01.09.	KECAMATAN PEKANBARU KOTA	
6.01.10.	KECAMATAN SENAPELAN	
6.01.11.	KECAMATAN SUKAJAD	
6.01.12.	KECAMATAN SAIL	
7.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
7.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
7.01.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.	PENGAWASAN	
8.01.	PENGAWASAN.	
8.01.01.	INSPEKTORAT DAERAH	

WALIKOTA PEKANBARU

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal **7 JUNI** 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR.. **80**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-Undangan,

SYAMSUWIR

NIP.196810281995031001

SKPD YANG MENGGUNAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	REKENING YANG DIPERKENANKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
Sekretariat Daerah	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	5.2.1.01.01. 5.2.2.01.01. 5.2.2.01.09 5.2.2.06.01. 5.2.2.06.02. 5.2.2.11.02. 5.2.2.15.02.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja alat tulis kantor Belanja Publikasi dan Dokumentasi Belanja cetak Belanja Penggandaan Belanja makanan dan minuman rapat Belanja perjalanan dinas luar daerah
Semua SKPD	Penerapan, Evaluasi dan Audit Manajemen Mutu - ISO		Tambahan dari RKPD 2019

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR. 80

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-undangan,

SYAMSUWIR

NIP.196810281995031001

WALIKOTA PEKANBARU

ttd.

FIRDAUS

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3
22.009.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana	
22.010.	Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan penanggulangan bencana	
22.011.	kegiatan penyuluhan penanggulangan bencana	
22.012.	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	
22.013.	Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	
22.014.	Rehabilitasi sarana dan prasarana terdampak bencana	
22.015.	rekonstruksi sarana dan prasarana terdampak bencana	
22.016.	kegiatan pencegahan dan pengendalian bencana alam	
22.018.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	
22.019.	Penyusunan dokumen rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana	
22.020.	Pelaksanaan gladi lapangan penanggulangan bencana	
22.021.	Sosialisasi norma standar prosedur dan manual penanggulangan bencana	
23.	Program Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik	
23.003.	Peningkatan Pengamanan Pemilihan Presiden	

Urusan : 8.01. - PENGAWASAN

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3
01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
01.001.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) OPD	
01.002.	Evaluasi LPPD	
01.003.	Reviu Atas Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran	

WALIKOTA PEKANBARU

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 JUNI 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR... 80

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-Undangan,

SYAMSUWIR

NIP.196810281995031001

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
8.4.1.01.04.	Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO	
8.4.1.01.05.	Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO	
8.4.1.01.06.	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO	
8.4.1.01.07.	Dst	
8.4.2.	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
8.4.2.01.	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
8.4.2.01.01.	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO	
8.4.2.01.02.	Surplus Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO	
8.4.2.01.03.	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri- Obligasi - LO	
8.4.2.01.04.	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO	
8.4.2.01.05.	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO	
8.4.2.01.06.	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	
8.4.2.01.07.	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO	
8.4.2.01.08.	Dst	
8.4.3.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
8.4.3.01.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
8.4.3.01.01.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
8.4.3.01.02.	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek- LO	
8.4.3.01.03.	Dst	
8.5.	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	
8.5.1.	Pendapatan Luar Biasa - LO	
8.5.1.01.	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO	
8.5.1.01.01.	Pendapatan Pcs Luar Biasa - LO	

WALIKOTA PEKANBARU

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal **7 JUNI** 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR. **80**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-Undangan,


SYAMSUWIR

NIP.196810281995031001

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
9.3.2.01.06.	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	
9.3.2.01.07.	Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO	
9.3.2.01.08.	Dst	
9.3.3.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
9.3.3.01.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
9.3.3.01.01.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
9.3.3.01.02.	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO	
9.3.3.01.03.	Dst	
9.4.	BEBAN LUAR BIASA	
9.4.1.	Beban Luar Biasa	
9.4.1.01.	Beban Luar Biasa	
9.4.1.01.01.	Beban Bencana Alam	
9.4.1.01.02.	Beban Luar Biasa Lainnya	
9.4.1.01.03.	Dst	

WALIKOTA PEKANBARU

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal **7 Juni** 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR.. **80**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bidang Hukum dan
Perundang-Undangan,

SYAMSUWIR

NIP.196810281995031001

6.2.3.03.01.	Bank...	
6.2.3.03.02.	Dst....	
6.2.3.04.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan bukan Bank	
6.2.3.04.01.	Lembaga keuangan bukan Bank	
6.2.3.04.02.	Dst....	
6.2.3.05.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	
6.2.3.05.01.	Penerusan pinjaman...	
6.2.3.05.02.	Dst....	
6.2.3.06.	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah lain	
6.2.3.06.01.	Pemerintah daerah....	
6.2.3.06.02.	Dst....	
6.2.3.07.	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank	
6.2.3.07.01.	Bank	
6.2.3.07.02.	Dst....	
6.2.3.08.	Pembayaran Pckok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga keuangan bukan bank	
6.2.3.08.01.	Lembaga keuangan bukan bank...	
6.2.3.08.02.	Dst....	
6.2.3.09.	Pelunasan Obligasi daerah pada saat jatuh tempo	
6.2.3.09.01.	Obligasi atas nama	
6.2.3.09.02.	Obligasi nomor.....	
6.2.3.09.03.	Dst	
6.2.3.10.	Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo	
6.2.3.10.01.	Obligasi atas nama	
6.2.3.10.02.	Obligasi nomor....	
6.2.3.10.03.	Dst	
6.2.3.11.	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	
6.2.3.11.01.	Pembayaran Utang Pihak Ketiga	
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	
6.2.4.01.	Pemberian Pinjaman daerah kepada Pemerintah	
6.2.4.01.01.	Pemerintah	
6.2.4.02.	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah lain	
6.2.4.02.01.	Pemerintah daerah ...	
6.2.4.03.	Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Perusahaan Daerah	
6.2.4.03.01.	Pinjaman Modal Kerja Kepada PDAM	
6.2.5.	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	
6.2.5.01.	Pembayaran Utang Pihak Ketiga	
6.2.5.01.01.	Pembayaran Utang Pihak Ketiga (Rekanan)	
6.2.5.01.02.	Pembayaran Hutang Kepada PDAM Tirta Siak	
6.2.6.	Pengembalian Dana Pusat	
6.2.6.01.	Pengembalian Sisa Dana	
6.2.6.01.01.	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)	
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	

WALIKOTA PEKANBARU

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 JUNI 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-Undangan,

SYAMSUWIR

NIP.196810281995031001

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
3.1.2.06.	Surplus/Defisit	
3.1.2.06.01.	Surplus/Defisit	
3.1.3.	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	
3.1.3.01.	RK PPKD	
3.1.3.01.01.	RK PPKD	

WALIKOTA PEKANBARU

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal **7 JUNI** 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR...**80**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-undangan,


SYAMSUWIR

NIP.196810281995031001

Lampiran IX : Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor : 80 TAHUN 2018
Tanggal : 7 JUNI 2018

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
SUSUNAN REKENING NON ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
7.	Non Anggaran	
7.1.	Penerimaan Non Anggaran	
7.1.1.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
7.1.2.	Penerimaan IWP	
7.1.3.	Penerimaan Taperum	
7.1.4.	Iuran Premi JKK	
7.1.5.	Iuran Premi JKM	
7.1.6.	Lain lain	
7.1.7.	PPH 21	
7.1.8.	Iuran Kesehatan BPJS	
7.1.9.	Hutang Kelebihan	
7.2.	Pengeluaran Non Anggaran	
7.2.1.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
7.2.2.	Penyetoran Iuran Wajib Pegawai (IWP)	
7.2.3.	Penyetoran Taperum	
7.2.4.	Penyetoran PPh	
7.2.5.	Pengeluaran Panjar	
7.2.6.	Pengeluaran Lan lain	

WALIKOTA PEKANBARU

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 JUNI 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR. 80

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-undangan,


SYAMSUWIR

NIP.196810281995031001

C. Pengadaan Kendaraan Dinas

- Hanya dapat dilaksanakan oleh BPKAD Kota Pekanbaru, Namun proses penganggaran tetap pada OPD masing-masing dengan memperhatikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Pekanbaru, 7 JUNI 2018

WALIKOTA PEKANBARU

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 JUNI 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR...80

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-Undangan,


SYAMSUWIR

NIP.196810281995031001